

Pemberdayaan pokja desa wisata rintisan kiarasari melalui penyusunan indikator kinerja

Candra Karismawan¹⁾, Rahmat Darmawan²⁾, Yusnidar³⁾, Aban Banu Ma'shum⁴⁾

^{1,2,3,4}Program Sarjana Terapan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Jl. R. Mangun Muka Raya No.11, 13220, Indonesia

Telp/Fax : (13220) 081319144400, E-mail : humas@unj.ac.id

E-mail : candra.karismanan@unj.ac.id¹⁾, rahmat-darmawan@unj.ac.id²⁾,

Yusnidarmhsunj@gmail.com³⁾, abanalmaksum@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Desa Wisata Kiarasari memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, namun pengelolaannya masih menghadapi kendala pada aspek ancillary seperti kelembagaan, administrasi, dan pelayanan wisata yang belum optimal. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun indikator kinerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Metode yang digunakan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui observasi, wawancara, serta pendampingan penyusunan indikator kinerja kepada pengelola. Hasil menunjukkan bahwa indikator kinerja berbasis aspek ancillary berhasil disusun secara sistematis dan aplikatif. Penerapan indikator ini meningkatkan kapasitas pengelola dalam menjalankan fungsi kelembagaan, administrasi, dan pelayanan secara lebih terarah. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan pengelolaan desa wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Ancillary, Desa Wisata, Pemberdayaan masyarakat, Indikator Kinerja, Pokja*

Abstract

Kiarasari Tourism Village possesses significant natural and cultural potential that can be sustainably developed. However, its management still faces challenges, particularly in the ancillary aspects such as institutional capacity, administrative systems, and tourism services that have not yet been optimized. This study aims to develop performance indicators to improve the quality of tourism village management. The method employed is a community service approach, including observation, interviews, and assistance in formulating performance indicators with the village management team. The results show that performance indicators based on ancillary aspects were successfully developed in a systematic and applicable manner. The implementation of these indicators enhances the capacity of managers in carrying out institutional, administrative, and service functions in a more structured way. Therefore, this initiative contributes to creating more effective and sustainable tourism village management.

Keywords: *Ancillary, Tourism Village, Community Empowerment, Performance Indicators, Working Group (Pokja)*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT) telah berkembang menjadi salah satu pendekatan strategis dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di Indonesia (Sulistiyadi et al., 2021). Pendekatan ini menempatkan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya wisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar destinasi (Nugroho & Dahuri, 2012). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan pengembangan desa wisata sebagai prioritas nasional, dengan target lebih dari 4.000 desa wisata aktif pada tahun 2024 (Kemenparekraf, 2022). Dalam konteks ini, pemberdayaan kelompok kerja (pokja) di desa wisata rintisan menjadi kunci keberhasilan transformasi potensi lokal menjadi produk wisata yang kompetitif dan berkelanjutan (Prasetyo & Setiawan, 2023).

Desa wisata rintisan merupakan tahap awal dalam siklus pengembangan destinasi wisata, di mana komunitas lokal mulai mengidentifikasi dan mengorganisir potensi wisata yang dimiliki. Pada tahap ini, terdapat setidaknya sepuluh aspek ancillary yang perlu dipenuhi, meliputi: kelembagaan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur dasar, atraksi wisata, amenitas, aksesibilitas,

promosi dan pemasaran, pengelolaan keuangan, keamanan dan kenyamanan, serta keberlanjutan lingkungan (Yoeti, 2008; Suwena & Widyatmaja, 2010). Kesepuluh aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem pariwisata yang terintegrasi di tingkat desa (Putra & Suarjana, 2017). Kelemahan pada salah satu aspek akan berpengaruh terhadap kualitas pengalaman wisatawan secara keseluruhan, sehingga diperlukan sistem pemantauan berbasis indikator kinerja yang komprehensif dan terukur (Astuti & Rahmawati, 2023).

Desa Kiarasari, yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki potensi wisata alam yang signifikan dengan keberadaan kawasan hutan lindung, perkebunan teh, serta keunikan budaya lokal masyarakat Sunda yang masih terjaga kelestariannya. Desa ini telah ditetapkan sebagai desa wisata rintisan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021, dan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Wisata sebagai unit pengelola operasional. Kelompok kerja tersebut terdiri dari berbagai unsur masyarakat, termasuk karang taruna, ibu-ibu PKK, tokoh adat, dan pelaku usaha lokal, yang berkolaborasi dalam mengembangkan paket wisata berbasis potensi desa. Sebagai desa wisata rintisan, Kiarasari memiliki modal awal yang cukup memadai berupa kekayaan alam, budaya, dan semangat partisipasi warga yang tinggi dalam mendukung pengembangan pariwisata desa.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil observasi awal dan wawancara mendalam dengan pengurus Pokja Desa Wisata Kiarasari mengidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar pada kesepuluh aspek ancillary. Pada aspek kelembagaan, Pokja belum memiliki struktur organisasi yang jelas dengan uraian tugas terperinci. Pada aspek sumber daya manusia, pemandu wisata lokal belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hospitality dan manajemen wisata. Infrastruktur penunjang seperti toilet umum, area parkir, dan papan informasi masih sangat minim. Atraksi wisata yang ditawarkan belum terdokumentasi dan dikemas secara profesional. Amenitas berupa homestay dan warung makan belum memenuhi standar kebersihan yang dipersyaratkan. Aksesibilitas menuju desa masih terbatas karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya beraspal. Promosi digital melalui media sosial dan platform wisata online belum dilakukan secara konsisten. Pengelolaan keuangan Pokja belum menggunakan sistem pembukuan yang transparan dan akuntabel. Aspek keamanan belum memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang terdokumentasi. Terakhir, pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di kawasan wisata belum berjalan optimal (Hasil Observasi, 2024).

Indikator kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) merupakan alat manajemen strategis yang telah terbukti efektif dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi capaian organisasi pariwisata di berbagai konteks (Sofield, 2003). Dalam konteks destinasi wisata berbasis masyarakat, pengembangan indikator kinerja yang tepat dan kontekstual menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan (Widodo & Rahayu, 2022). Penelitian terdahulu di Indonesia telah menunjukkan bahwa penerapan sistem indikator kinerja yang komprehensif pada pokja desa wisata secara signifikan meningkatkan efektivitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan kepuasan wisatawan (Sulistiyadi et al., 2021). Lebih lanjut, Zaenuri (2021) menemukan bahwa organisasi pariwisata lokal yang menggunakan indikator kinerja terstruktur mampu mencapai pertumbuhan kunjungan wisatawan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakannya. Prasetyo dan Setiawan (2023) juga menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas melalui instrumen kinerja yang terukur berkontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan destinasi wisata desa.

Meskipun literatur tentang indikator kinerja destinasi wisata telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan terkait pengembangan indikator kinerja spesifik untuk pokja desa wisata rintisan di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada destinasi wisata yang sudah berkembang dan mapan, sehingga belum tentu dapat diterapkan langsung pada konteks desa wisata rintisan dengan segala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastrukturnya (Prasetyo & Setiawan, 2023). Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menghasilkan indikator kinerja generik yang tidak memperhitungkan keunikan aspek ancillary dan karakteristik sosial-budaya komunitas lokal (Sulistiyadi et al., 2021; Astuti & Rahmawati, 2023). Belum tersedianya panduan operasional berbentuk handbook yang dapat langsung digunakan oleh pokja desa wisata rintisan menjadi celah

yang perlu segera diisi melalui penelitian berbasis partisipasi komunitas yang lebih mendalam dan kontekstual.

Meskipun literatur tentang indikator kinerja destinasi wisata telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan terkait pengembangan indikator kinerja spesifik untuk pokja desa wisata rintisan di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada destinasi wisata yang sudah berkembang dan mapan, sehingga belum tentu dapat diterapkan langsung pada konteks desa wisata rintisan dengan segala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastrukturnya (Prasetyo & Setiawan, 2023). Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menghasilkan indikator kinerja generik yang tidak memperhitungkan keunikan aspek ancillary dan karakteristik sosial-budaya komunitas lokal (Sulistiyadi et al., 2021; Astuti & Rahmawati, 2023). Belum tersedianya panduan operasional berbentuk handbook yang dapat langsung digunakan oleh pokja desa wisata rintisan menjadi celah yang perlu segera diisi melalui penelitian berbasis partisipasi komunitas yang lebih mendalam dan kontekstual.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan fokus utama pada identifikasi serta penguatan kinerja pengelolaan desa wisata rintisan melalui tinjauan aspek ancillary. Objek penelitian ditekankan pada sistem pendukung utama yang menentukan kesiapan pengelolaan, seperti kelembagaan, manajemen operasional, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, informasi, promosi, hingga pelayanan wisata. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang diambil bukan sekadar bersifat teoritis, melainkan melalui pendampingan langsung yang dilakukan bersama pihak Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari, Bogor. Dengan melibatkan POKJA secara langsung, proses penguatan kapasitas dapat berjalan lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga pengelola mampu mengadopsi sistem manajemen baru secara bertahap dan berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi bersama POKJA
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi indikator kinerja
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026



Gambar 3. Partisipasi POKJA dalam sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Data dalam kegiatan ini dikumpulkan lewat teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memotret kondisi pengelolaan secara utuh. Observasi dilakukan guna melihat fakta lapangan, sementara wawancara digunakan untuk membedah akar permasalahan dan kebutuhan nyata para pengelola. Seluruh data tersebut kemudian diukur menggunakan instrumen indikator kinerja yang

diadaptasi dari literatur yang relevan dengan fokus pada elemen ancillary. Instrumen ini tidak hanya berfungsi memetakan kondisi awal, tetapi juga menjadi kompas atau acuan dalam setiap tahapan pendampingan yang diberikan kepada pengelola.

Secara teknis, alur kegiatan dimulai dengan tahap identifikasi masalah untuk menemukan celah dalam aspek ancillary. Setelah masalah dipetakan, langkah berikutnya adalah eksekusi pendampingan yang menitikberatkan pada perbaikan struktur lembaga, tertib administrasi, serta standarisasi layanan dan sistem pendukung lainnya. Seluruh rangkaian proses ini ditutup dengan evaluasi untuk meninjau perubahan nyata pada pemahaman maupun praktik pengelolaan di tingkat desa. Hasil temuan kemudian dianalisis dengan mengelompokkan data berdasarkan indikator yang ada, lalu diinterpretasikan untuk menentukan sejauh mana kesiapan serta efektivitas dari pendampingan yang telah dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kiarasari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini berada di kawasan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, menjadikannya memiliki lansekap alam yang kaya dan beragam. Keberadaan kawasan hutan lindung di sekitarnya menciptakan ekosistem yang lestari dengan sumber daya alam berlimpah, termasuk sumber mata air, keragaman flora dan fauna, serta keindahan alam yang menjadi daya tarik utama bagi pengembangan wisata alam. Desa Kiarasari ditetapkan sebagai Desa Wisata Rintisan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan daya tarik unggulan berupa Curug Cidurian yang merupakan air terjun bertingkat yang dikelilingi vegetasi tropis lebat, serta memiliki potensi ekowisata, agrowisata, dan wisata budaya berbasis kearifan lokal masyarakat Sunda pedesaan.

Aksesibilitas menuju Desa Kiarasari dapat ditempuh melalui jalur darat dari pusat Kota Bogor dengan jarak sekitar 60 sampai 70 kilometer, melewati Kecamatan Jasinga atau Kecamatan Cigudeg. Kondisi jalan menuju desa sebagian besar sudah beraspal meskipun terdapat beberapa segmen yang masih berupa jalan tanah berbatu, terutama di jalur menuju lokasi wisata utama. Letak desa yang berada di perbukitan pada ketinggian sekitar 700 hingga 900 meter di atas permukaan laut memberikan suasana sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 18 sampai 24 derajat Celsius, menjadikannya destinasi yang nyaman untuk wisata alam dan rekreasi keluarga.

Berdasarkan Laporan Bulanan Penduduk Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, total penduduk Desa Kiarasari tercatat sebanyak 9.838 jiwa, yang terdiri dari 5.044 jiwa laki-laki dan 4.794 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.874 KK. Data demografi ini menjadi landasan penting dalam memahami kapasitas dan potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan desa wisata.

Tabel 1. Data Kelompok Umur Penduduk Desa Kiarasari Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 4 Tahun	420	380	800
2	5 - 9 Tahun	475	461	936
3	10 - 14 Tahun	448	457	905
4	15 -19 Tahun	458	455	913
5	20 - 24 Tahun	498	457	955
6	25 - 29 Tahun	418	385	803
7	30 - 34 Tahun	470	441	911
8	35 - 39 Tahun	424	336	790

9	40 - 44 Tahun	287	298	585
10	45 - 49 Tahun	276	269	545
11	50 - 54 Tahun	251	241	492
12	55 - 59 Tahun	210	198	408
13	60 - 64 Tahun	206	175	381
14	65 Tahun Ke Atas	203	211	414
	JUMLAH	5.044	4.794	9.838

Sumber: Laporan Bulanan Penduduk Desa Kiarasari Tahun 2025

Dari sisi struktur usia, kelompok penduduk usia produktif (15–49 tahun) mendominasi komposisi demografi dengan total 5.044 jiwa dari total penduduk, mencakup kelompok usia 15–19 tahun (913 jiwa), 20–24 tahun (955 jiwa), 25–29 tahun (803 jiwa), 30–34 tahun (911 jiwa), 35–39 tahun (790 jiwa), 40–44 tahun (585 jiwa), dan 45–49 tahun (545 jiwa). Kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 2.641 jiwa, sementara penduduk lansia (60 tahun ke atas) berjumlah 795 jiwa. Besarnya proporsi penduduk usia produktif ini merupakan modal sosial yang strategis dalam pengembangan desa wisata, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja lokal untuk pengelolaan destinasi, pemandu wisata, serta pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

Tabel 2. Kelompok Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ISLAM	5,044	4,794	9,838
2	KHATOLIK	-	-	0
3	PROTESTAN	-	-	0
4	BUDHA	-	-	0
5	HINDU	-	-	0
	JUMLAH	5,044	4,794	9,838

Sumber: Laporan Bulanan Penduduk Desa Kiarasari Tahun 2025

Dari sisi agama, data menunjukkan bahwa seluruh penduduk Desa Kiarasari, yakni 9.838 jiwa atau 100% dari total populasi, memeluk agama Islam. Tidak terdapat penduduk yang tercatat menganut agama Katolik, Protestan, Buddha, maupun Hindu. Kondisi homogenitas agama ini mencerminkan ikatan sosial dan budaya yang kuat di antara warga desa, yang pada gilirannya berpotensi mendukung terciptanya solidaritas sosial dan semangat gotong royong yang tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, termasuk pengembangan desa wisata.

Tabel 3. Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan

NO	SEKOLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD/MI	418	425	843
2	Tamat SD/MI	2,014	1,948	3,962
3	Tamat SLTP/MTs	454	422	876
4	Tamat SMA/MA	306	225	531
5	Tamat Diploma	12	9	21
6	Tamat Perguruan Tinggi	42	35	77

Sumber: Laporan Bulanan Penduduk Desa Kiarasari Tahun 2025

Profil pendidikan formal penduduk di Desa Kiarasari didominasi secara signifikan oleh tamatan SD/MI, disusul oleh kelompok tamatan SLTP/MTs, kelompok tidak tamat SD/MI yang proporsinya juga cukup besar, serta tamatan SMA/MA. Sebaliknya, representasi modal manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi di desa ini masih sangat minim, di mana tamatan Perguruan Tinggi dan kelompok tamatan Diploma menempati angka paling rendah. Karakteristik demografis yang sangat timpang antara dominasi kelulusan tingkat dasar dan minimnya lulusan pendidikan tinggi ini memberikan gambaran riil mengenai potret kapasitas akademik rata-rata masyarakat setempat yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan tata kelola wilayah serta pengelolaan potensi lokal di lapangan.

Tabel 4. Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	1,169
2	Pedagang	481
3	Pegawai Negeri Sipil	32
4	Pensiunan	6
5	TNI/POLRI	4
6	Wiraswasta	1,012
7	Karyawan Swasta	59
8	Tidak Bekerja	870

Sumber: Laporan Bulanan Penduduk Desa Kiarasari Tahun 2025

Adapun dari sisi mata pencaharian, petani menjadi profesi dominan dengan 1.169 orang, disusul oleh wiraswasta (1.012 orang), karyawan swasta (870 orang), pedagang (481 orang), tidak bekerja (59 orang), Pegawai Negeri Sipil (32 orang), pensiunan (6 orang), dan TNI/POLRI (4 orang). Dominasi sektor pertanian ini mengindikasikan bahwa pengembangan agrowisata berbasis komoditas lokal—seperti wisata kebun, panen bersama, atau pengolahan produk hasil pertanian—memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai produk wisata unggulan Desa Kiarasari. Selain itu, jumlah kepala keluarga sebanyak 2.874 KK dengan komposisi 2.389 umpi/suhunan (keluarga inti) menunjukkan struktur sosial yang masih berbasis komunitas kekerabatan yang erat, suatu modal sosial yang sangat berharga dalam membangun tata kelola desa wisata berbasis partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, data demografi tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Desa Kiarasari dalam mengembangkan sektor pariwisata. Ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang besar, tradisi pertanian yang kuat, serta homogenitas keagamaan (100% Islam) yang menciptakan kekompakan nilai dan budaya komunitas, menjadi aset strategis yang dapat dioptimalkan. Namun demikian, keterbatasan tingkat pendidikan formal yang masih didominasi lulusan SD/MI menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi melalui program pemberdayaan dan pelatihan kepariwisataan yang terencana dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian ini.



Gambar 4. Peta Pesebaran Daya Tarik Wisata Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor
Sumber: Mahasiswa Berdampak Usaha Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta, 2026

Berdasarkan peta wisata yang telah disusun oleh Mahasiswa Berdampak UPW UNJ 2026, Desa Kiarasari memiliki sebaran daya tarik wisata yang cukup beragam dan tersebar di berbagai wilayah desa. Peta tersebut mengidentifikasi empat kategori daya tarik utama, yaitu wisata alam, agrowisata, wisata buatan, dan wisata budaya, yang masing-masing memiliki lokasi dan karakteristik berbeda. Secara keseluruhan, persebaran daya tarik wisata ini mencerminkan kekayaan potensi Desa Kiarasari sebagai destinasi wisata pedesaan yang komprehensif di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

1. Wisata Alam

Wisata alam merupakan kategori daya tarik yang paling dominan di Desa Kiarasari, ditandai dengan jalur wisata alam (berwarna biru muda pada peta) yang melewati beberapa titik utama di wilayah desa. Terdapat tiga daya tarik wisata alam unggulan, yaitu Curug Cidurian, Curug Cirendeudeu, dan Curug Pintu Air. Curug Cidurian merupakan air terjun ikonik yang terletak di bagian barat daya desa, dikelilingi oleh vegetasi tropis yang lebat dan menjadi daya tarik wisata utama yang paling dikenal. Curug Cirendeudeu berlokasi di bagian tenggara desa, dekat dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, menawarkan keindahan air terjun alami yang masih terjaga keasliannya. Adapun Curug Pintu Air berada di sisi timur desa, memberikan variasi atraksi air terjun yang dapat dikunjungi dalam satu rangkaian perjalanan wisata. Selain ketiga curug

tersebut, kawasan Hutan Pinus yang terletak di bagian timur laut desa turut menjadi daya tarik alam yang menawarkan suasana hutan pinus yang asri dan cocok untuk kegiatan trekking maupun fotografi alam.

2. Agrowisata

Jalur agrowisata (berwarna merah muda/pink pada peta) menghubungkan beberapa titik daya tarik berbasis pertanian dan hasil alam di Desa Kiarasari. Daya tarik agrowisata utama meliputi Pertanian Cipudalle, Cibuluh Farm, dan Saung Gula Aren. Pertanian Cipudalle merupakan kawasan pertanian aktif yang menjadi representasi kekuatan sektor agraris desa. Cibuluh Farm yang berlokasi di sisi barat desa merupakan lahan pertanian terpadu yang dapat dijadikan wahana edukasi bagi wisatawan untuk mengenal proses budidaya tanaman lokal secara langsung. Saung Gula Aren yang berada di bagian barat laut desa menyajikan pengalaman autentik proses pembuatan gula aren tradisional, sebuah kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Keberadaan daya tarik agrowisata ini sangat selaras dengan dominasi profesi petani di Desa Kiarasari, sehingga pengembangannya berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi para petani lokal.

3. Wisata Buatan

Wisata buatan ditandai dengan jalur berwarna kuning pada peta dan mencakup daya tarik yang dikembangkan secara terencana oleh masyarakat atau pengelola desa. Cipudalle Camp merupakan daya tarik wisata buatan utama yang berlokasi di bagian tenggara desa, menawarkan fasilitas perkemahan (camping ground) di tengah alam pegunungan yang sejuk. Lokasi ini strategis karena berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga memberikan pengalaman berkemah yang otentik dengan latar belakang alam pegunungan tropis. Cipudalle Camp menjadi pilihan wisata yang semakin diminati, terutama oleh kelompok wisatawan muda, komunitas pecinta alam, dan keluarga yang mencari pengalaman rekreasi berbeda dari destinasi wisata konvensional. Danau Angsa Langgeng Mandiri yang berlokasi di bagian utara desa juga termasuk dalam kategori wisata buatan, menawarkan daya tarik berupa danau yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat sebagai wahana wisata air dan relaksasi.

4. Wisata Budaya

Wisata budaya ditandai dengan jalur berwarna ungu pada peta dan mencerminkan kekayaan tradisi serta kearifan lokal masyarakat Sunda di Desa Kiarasari. Daya tarik wisata budaya yang teridentifikasi pada peta adalah Kesenian Wayang Golek dan UMKM Olahan Keripik. Kesenian Wayang Golek merupakan warisan budaya tak benda yang sangat identik dengan tradisi Sunda, berlokasi di bagian timur laut desa. Seni pertunjukan ini tidak hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral dan filosofi kehidupan masyarakat Sunda yang kaya makna, sehingga menjadi daya tarik budaya yang autentik bagi wisatawan. UMKM Olahan Keripik yang juga berlokasi di bagian timur desa merupakan representasi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, di mana produk keripik dari bahan baku lokal diolah dan dikemas sebagai oleh-oleh khas Desa Kiarasari. Keberadaan UMKM ini turut memperkuat ekosistem pariwisata desa melalui penyediaan produk wisata belanja yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, peta persebaran daya tarik wisata Desa Kiarasari menggambarkan bahwa desa ini memiliki potensi wisata yang lengkap dan beragam, mulai dari wisata alam berbasis air terjun dan hutan, agrowisata berbasis pertanian dan produk lokal, wisata buatan berupa camping ground dan danau, hingga wisata budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi Sunda. Persebaran yang merata di berbagai penjuru desa ini mengindikasikan potensi pengembangan paket wisata terpadu yang dapat menarik berbagai segmen wisatawan dengan minat dan kebutuhan berbeda. Dengan pengelolaan yang terstruktur melalui sistem indikator kinerja yang aplikatif, seluruh potensi daya tarik tersebut dapat dioptimalkan untuk mewujudkan Desa Kiarasari sebagai desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 5. Pemasaran produk lokal KWT
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026



Gambar 6. Produk UMKM Desa Kiarasari
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Meskipun masih berada pada tahap desa wisata rintisan, Desa Kiarasari pada dasarnya telah memiliki beberapa indikator kinerja pendukung (ancillary) yang menjadi modal awal dalam pengelolaan wisata. Hal ini terlihat dari adanya organisasi pengelola berupa POKJA desa wisata, keterlibatan kelompok masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pemuda desa, aktivitas pemasaran produk lokal, serta keberadaan layanan pendukung seperti PUSTU dan mobil siaga desa. Namun demikian, berbagai indikator tersebut belum berjalan secara optimal karena masih lemahnya koordinasi kelembagaan, administrasi, pembagian tugas, serta sistem pelayanan wisata yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya memerlukan potensi daya tarik wisata, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem pengelolaan internal agar seluruh elemen pendukung dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari, berangkat dari kesadaran bahwa fondasi utama sebuah desa wisata rintisan bukan hanya terletak pada keindahan alamnya, melainkan pada kekuatan sistem pendukung internalnya. Melalui pendampingan intensif bersama Kelompok Kerja (POKJA), terungkap bahwa kendala terbesar yang menghambat efektivitas pengelolaan adalah aspek ancillary yang masih lemah. Secara praktis, pengelolaan di lapangan masih berjalan tanpa arah yang jelas akibat pembagian peran yang tumpang tindih. Dari sisi legalitas, organisasi POKJA yang terdapat di desa tersebut sejatinya telah memiliki status legal. Namun demikian, legalitas yang diperoleh hanya bersandar pada Surat Keputusan (SK) Desa, tanpa disertai pengakuan atau legitimasi dari lembaga yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas POKJA masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengacu pada kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, persoalan akuntabilitas keuangan menjadi temuan yang patut mendapat perhatian serius. Laporan keuangan organisasi POKJA tidak dilaporkan kepada pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang, melainkan hanya dikelola secara internal oleh para anggota organisasi itu sendiri. Pola pengelolaan keuangan yang demikian mengindikasikan bahwa distribusi dan pemanfaatan dana organisasi cenderung diperuntukkan bagi kepentingan kelompok semata, bukan diarahkan pada penguatan dan pengembangan desa wisata secara menyeluruh. Lemahnya koordinasi dan transparansi ini menjadi indikasi kuat bahwa tanpa struktur tata kelola yang tegas dan akuntabel, sebuah organisasi tidak akan memiliki mekanisme kontrol yang menjamin keberlangsungan jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan desa wisata rintisan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan atraksi wisata, tetapi juga kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurut Widodo dan Rahayu (2022), penerapan sistem indikator kinerja dan mekanisme pengelolaan yang jelas berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi pengelola desa wisata.

Kondisi tidak optimal dan konsisten ini juga terlihat nyata pada peran kelompok pendukung seperti Kelompok Wanita Tani (KWT). Sebagai motor penggerak ekonomi kreatif, KWT sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengolah sumber daya alam lokal menjadi produk makanan khas Desa Kiarasari. Namun, dalam pelaksanaannya, aktivitas produksi dan organisasi KWT ditemukan belum berjalan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, meski sudah ada, masih memerlukan wadah koordinasi yang lebih solid agar

kontribusi mereka tidak bersifat momentum semata, melainkan menjadi bagian integral dari rantai pasok layanan desa wisata. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh konsistensi partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata. Dewi, Fandeli, dan Baiquni (2013) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang merata dalam pengembangan desa wisata.

Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian diwujudkan melalui penyusunan Handbook Pedoman POKJA sebagai langkah strategis untuk mengubah pola kerja yang semula informal menjadi lebih terstruktur dan profesional. Buku panduan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen dalam membenahi manajemen operasional, administrasi, dan sistem keuangan yang selama ini belum berjalan optimal. Melalui pedoman tersebut, peran kelompok seperti KWT mulai diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan yang lebih terarah sehingga setiap aktivitas memiliki pembagian tugas dan standar kerja yang jelas. Kehadiran handbook ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan desa wisata secara lebih akuntabel dan berkelanjutan. Kejelasan pembagian tugas dan prosedur kerja tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan organisasi terhadap individu tertentu serta menciptakan keberlanjutan pengelolaan. Prasetyo dan Setiawan (2023) menyebutkan bahwa penguatan kapasitas kelompok pengelola melalui instrumen manajemen yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program wisata di tingkat desa.

Di sisi lain, kualitas pelayanan dan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan kenyamanan pengunjung. Kurangnya fasilitas kesehatan dan belum adanya sistem mitigasi bencana di lokasi wisata menunjukkan bahwa aspek keamanan belum sepenuhnya terintegrasi dalam layanan. Melalui handbook ini, standar pelayanan mulai diarahkan untuk menjamin keselamatan wisatawan, di samping memperkuat sinergi antara POKJA, KWT, dan pemuda agar operasional harian berjalan lebih stabil. Untuk memecah keterisolasian informasi, strategi branding dan pemasaran digital mulai diperkenalkan agar produk olahan KWT dan keindahan Curug Cidurian dapat dikenal lebih luas melalui jejaring eksternal. Penguatan promosi berbasis digital menjadi semakin relevan mengingat proses pencarian informasi wisata saat ini banyak dilakukan melalui media daring. Buchori et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan konten digital yang konsisten dapat meningkatkan visibilitas destinasi sekaligus memperkuat daya saing desa wisata di tengah perkembangan pasar wisata yang semakin kompetitif.

Jika dibandingkan dengan pendekatan lama yang sering kali terfokus pada pembangunan fisik, hasil pengabdian ini menegaskan bahwa pada tahap rintisan, pembenahan "dapur" organisasi jauh lebih mendesak. Keberhasilan sebuah desa wisata tidak hanya diukur dari keindahan daya tariknya, tetapi dari seberapa siap dan konsisten sistem internal dalam mengelolanya. Pada akhirnya, sinkronisasi antara penguatan kelembagaan, manajemen, dan peningkatan kapasitas SDM ini menjadi fondasi utama bagi Kampung Cibuluh untuk tumbuh menjadi desa wisata yang mandiri dan mampu mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Hasil ini memperlihatkan bahwa penguatan aspek ancillary memiliki posisi strategis dalam fase pengembangan desa wisata rintisan. Sejalan dengan klasifikasi desa wisata Kemenparekraf (2023), peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang menentukan kesiapan desa wisata untuk berkembang menuju tahap yang lebih maju.

Tabel 5. Ringkasan Kondisi Pengelolaan Desa Wisata

Aspek	Temuan Utama
Kelembagaan	Struktur organisasi belum optimal, ditandai dengan pembagian tugas dan fungsi yang belum berjalan secara jelas
Manajemen operasional	Kegiatan belum terarah dan terkoordinasi, dimana pelaksanaan kegiatan masih berjalan tanpa perencanaan dan koordinasi yang jelas
Administrasi	Pencatatan dan dokumentasi belum tertata, sehingga data kegiatan belum tersusun secara sistematis dan rapi
Keuangan	Belum memiliki sistem pencatatan yang sistematis, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan
Sumber daya manusia	Kapasitas POKJA masih terbatas dan belum optimal secara kinerja serta keterlibatan kelompok masyarakat (KWT dan pemuda) belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan
Informasi dan promosi	Pemanfaatan media informasi masih rendah, ditandai dengan belum optimalnya penyampaian informasi kepada wisatawan
Pelayanan wisata	Belum memiliki standar pelayanan, sehingga pelaksanaan pelayanan belum memiliki acuan yang jelas
Kemitraan	Kerja sama dengan pihak eksternal belum terbangun, sehingga dukungan dari pihak luar masih terbatas
Kesehatan (puskesmas/PUSTU)	Belum ada integrasi dengan layanan kesehatan terdekat, sehingga aspek keamanan dan keselamatan belum terkelola dengan baik

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kiarasari membuktikan bahwa pada tahap desa wisata rintisan, penguatan aspek ancillary internal merupakan prasyarat mendasar yang harus dipenuhi sebelum pengembangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif bersama Pokja Desa Wisata Kiarasari, teridentifikasi sejumlah kelemahan struktural pada aspek kelembagaan, akuntabilitas keuangan, serta manajemen pelayanan dan keamanan yang selama ini menghambat kinerja pengelolaan secara keseluruhan. Kondisi kelembagaan yang tumpang tindih, legalitas organisasi yang hanya bersandar pada Surat Keputusan Desa, serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan kepada pihak pemerintah desa menjadi temuan kritis yang memerlukan pembenahan segera.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, kegiatan ini berhasil merancang dan menyusun indikator kinerja berbasis sepuluh aspek ancillary secara sistematis dan kontekstual, serta melahirkan produk nyata berupa *Handbook* Pedoman Pokja yang berfungsi sebagai panduan operasional mandiri. Instrumen ini secara langsung membenahi tata kelola manajemen operasional, tertib administrasi, sistem keuangan yang akuntabel, serta mengintegrasikan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pemuda desa ke dalam alur pengelolaan yang lebih terstruktur. Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pembenahan "dapur" organisasi—yakni kelembagaan yang solid, tata kelola yang akuntabel, dan kapasitas sumber daya manusia yang terbangun—jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan fisik pada fase rintisan, dan merupakan fondasi utama bagi Desa Kiarasari untuk bertumbuh menjadi desa wisata yang mandiri, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak pengelola Desa Wisata Kiarasari atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, apresiasi diberikan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas dan administratif, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pendampingan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y., & Suyatno, S. (2025). Strategi optimalisasi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata Brayut. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*.
- Buchori, A., Sulisty, A., Annisa, R. N., & Mahanani, S. (2025). Pengelolaan konten publikasi desa wisata: Menciptakan keunggulan daya saing dan pengelolaan berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Organisasi*.
- Dharmawan, A. S., & Kumalasari, L. D. (2024). Pengelolaan dan potensi ekowisata desa wisata Sidorejo Indah di Jabung Kabupaten Malang. *Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*.
- Harjo, R., Damayanti, S. P., & Suteja, I. W. (2025). Optimalisasi peran kelompok sadar wisata dalam pemanfaatan potensi lokal sebagai daya tarik wisata di desa wisata Pengembur. *Journal of Responsible Tourism*, 5(1), 183–192.
- Kusumah Admaja, T. K. A. (2022). Desa wisata Pentingsari: Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Kebudayaan*.
- Nirwana, N. A., Widowati, N., & Maesaroh. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Sukomakmur dalam pengembangan desa wisata Kandri Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Kurniawan, A. R. (2025). Integrated rural development: Sebuah tinjauan literatur sistematis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Suroso, E., Putra, A. S., Santosa, A. D., Sartika, S. H., & Hendratawan, F. (2024). Pengembangan desa wisata di Desa Selawangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 55–61.
- Wijayanti, A., et al. (2022). Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan (Studi kasus Desa Wisata Karang, Trimulyo, Sleman). *JTEC*.
- Astuti, P. D., & Rahmawati, S. (2023). Pengembangan indikator kinerja kelembagaan desa wisata rintisan berbasis komunitas. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(2), 98–114.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117–226.
- Buchori, I., et al. (2025). Strategi marketing dan pengembangan desa wisata berbasis digital di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 249–263.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf). (2023). *Klasifikasi desa wisata: Rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kusumah, E. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), 33–48.
- Prasetyo, B., & Setiawan, A. (2023). Pemberdayaan pokja desa wisata melalui pelatihan manajemen berbasis indikator kinerja. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 89–101.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. *LP3ES*.
- Putra, I. N. D., & Suarjana, A. A. G. M. (2017). Aspek ancillary dalam pengembangan desa wisata rintisan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(2), 78–92.
- Sofield, T. H. B. (2003). *Empowerment for sustainable tourism development*. Pergamon Press.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Baiquni, M. (2021). Indikator keberlanjutan pengembangan desa wisata di Indonesia: Tinjauan sistematis. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(1), 1–18.

- Surmava, A. (2022). Sistem indikator kinerja untuk organisasi pengelola destinasi wisata lokal. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Hospitalitas*, 9(1), 22–37.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Udayana University Press.
- Widodo, S., & Rahayu, T. (2022). Pengaruh penerapan sistem indikator kinerja terhadap efektivitas tata kelola desa wisata. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 10(2), 215–228.
- Wiradiputra, F. A., & Brahmanto, E. (2016). Analisis persepsi wisatawan mengenai penurunan kualitas daya tarik wisata alam. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 129–137.
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata: Introduksi, informasi, dan implementasi*. Penerbit Kompas.
- Zaenuri, M. (2021). *Manajemen destinasi pariwisata: Sebuah pengantar*. Penerbit Deepublish.